

PERJANJIAN KINERJA 2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Garut No. 11 Bandung

Telp. 022-7278809 – 7278812

Fax. 022-7215894

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Syaifudin Rahadhian

Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rifqi Alimubarok

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, Januari 2023

PIHAK KEDUA
KETUA,



RIFQI ALIMUBAROK

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS,



ACHMAD SYAIFUDIN RAHADHIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	100%
4.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhanannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Hasil Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Jawa Barat yang di Reviu oleh Inspektorat	B
		Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN "BAIK"	B
		Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang mengisi dan menyampaikan Kartu Kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	85%

		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Jawa Barat	B
7.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu.	100%
8.	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.	100%
9.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%
10.	Meningkatnya penyelesaian Pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%

Program

Anggaran

076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

1. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (3356)	Rp.	83.943.000,-
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan (3363)	Rp.	9.135.000,-
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih (3364)	Rp.	105.000.000,-
4. Advokasi dan Sengketa Hukum (6638)	Rp.	30.722.000,-
5. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	Rp.	16.499.793.000,-
6. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu (6710)	Rp.	545.862.000,-
7. Pembentukan Badan <i>Ad Hoc</i> (6867)	Rp.	4.770.000,-

8. Masa Kampanye Pemilu (6870)	Rp.	184.708.000,-
9. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)	Rp.	248.489.000,-
10. Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Rp.	68.492.000,-
<u>076.01.WA Program Dukungan Manajemen</u>	Rp.	4.994.348.000,-
11. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Rp.	10.000.000,-
12. Manajemen Perencanaan dan Organisasi (3357)	Rp.	20.200.000,-
13. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358)	Rp.	7.073.474.000,-
14. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)	Rp.	39.824.000,-
15. Data dan Informasi (6634)	Rp.	3.500.000.000,-
16. Hibah Non Pemilihan		

Rp. 33.418.760.000,-

Bandung, Januari 2023

PIHAK KEDUA

KETUA,



RIFIQI ALIMUBAROK

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS,



ACHMAD SYAIFUDIN RAHADHIAN